

## **POLITIK IDENTITAS DI PANGGUNG DEMOKRASI: MELIHAT SIMBOL AGAMA MELALUI LENSE HABITUS DAN DRAMATURGI**

### ***IDENTITY POLITICS ON THE DEMOCRATIC STAGE: LOOKING AT RELIGIOUS SYMBOLS THROUGH THE LENS OF HABITUS AND DRAMATURGY***

**Muhammad Zidan Abadi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Kudus  
Email: [Zidanmuhammadabadi@gmail.com](mailto:Zidanmuhammadabadi@gmail.com)

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas permasalahan politik identitas berbasis agama di Indonesia, yang menjadi isu penting dalam konteks dinamika demokrasi modern. Fokus utama penelitian adalah bagaimana simbol-simbol agama digunakan dalam kampanye politik untuk menarik dukungan publik, serta dampaknya terhadap kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, mengadopsi teori habitus dari Pierre Bourdieu dan dramaturgi Erving Goffman untuk memahami interaksi antara simbol agama dan praktik politik. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun politik identitas berbasis agama dapat meningkatkan partisipasi politik dan solidaritas kelompok, dampak negatifnya juga signifikan. Penggunaan simbol agama sering kali menciptakan polarisasi sosial dan diskriminasi, yang dapat merusak kohesi masyarakat. Sebagai contoh, dalam berbagai pemilu, simbol-simbol agama dimanfaatkan untuk membentuk citra politik yang mengarah pada pembagian masyarakat menjadi "kami" dan "mereka." Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pentingnya pendidikan multikultural untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberagaman. Kedua, perlu adanya regulasi yang ketat terhadap pemanfaatan simbol agama dalam politik untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan. Ketiga, penguatan dialog antar-komunitas sangat diperlukan untuk membangun saling pengertian dan toleransi. Melalui pendekatan ini, diharapkan politik berbasis identitas dapat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, serta menjaga harmoni sosial dan integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci :** Politik Identitas, Simbol Agama, Demokrasi

#### ***Abstract***

*This article discusses the problem of religion-based identity politics in Indonesia, which has become an important issue in the context of modern democratic dynamics. The main focus of the research is how religious symbols are used in political campaigns to attract public support, as well as their impact on social cohesion and the quality of democracy. The method used is a qualitative approach with literature analysis, adopting Pierre Bourdieu's habitus theory and Erving Goffman's dramaturgy to understand the interaction between religious symbols and political practices. The findings show that while religion-based identity politics can increase political participation and group solidarity, its negative impacts are also significant. The use of religious symbols often creates social polarisation and discrimination, which can undermine community cohesion. For example, in many elections, religious symbols are utilised to shape political images that lead to the division of society into 'us' and 'them'. Therefore, this article recommends several strategic measures. Firstly, the importance of multicultural education to improve people's understanding of diversity. Second, there needs to be strict regulation of the use of religious symbols in politics to prevent excessive*

*exploitation. Third, strengthening inter-community dialogue is needed to build mutual understanding and tolerance. Through this approach, it is hoped that identity-based politics can be in line with the values of inclusive and equitable democracy, as well as maintaining social harmony and national integration amid the diversity of Indonesian society.*

**Keywords:** *Identity Politics, Religious Symbols, Democracy*

## **PENDAHULUAN**

Politik identitas di Indonesia menjadi salah satu fenomena penting dalam dinamika politik modern, terutama pada konteks pemilu dan perkembangan politik Islam. Simbol-simbol agama sering kali dimanfaatkan dalam kampanye politik untuk memperoleh legitimasi publik dan memobilisasi dukungan massa (Yunus et al., 2023). Fenomena ini tidak hanya menjadi bagian dari strategi politik, tetapi juga mencerminkan interaksi kompleks antara demokrasi dan politik Islam yang sering memicu konflik berbasis identitas sosial-politik (Khoirunnisa, 2023).

Penggunaan simbol agama dalam kampanye politik di Indonesia telah menjadi strategi umum untuk menarik perhatian pemilih dan membentuk preferensi politik mereka. Fenomena ini terlihat jelas pada Pemilu 2019, ketika simbol agama secara aktif dimanfaatkan untuk meraih suara pemilih. Namun, pemanfaatan simbol agama tersebut tidak selalu merefleksikan religiusitas masyarakat secara utuh (Zaluchu et al., 2019). Sebaliknya, hal ini lebih sering menjadi strategi pragmatis yang dirancang untuk menguatkan politik identitas dan membangun loyalitas massa terhadap kelompok tertentu (Zaluchu et al., 2019).

Politik identitas berbasis agama telah membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Polarisasi masyarakat akibat isu agama menjadi salah satu dampak yang paling mencolok, sebagaimana yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (Ubaid & Subandi, 2017). Dalam kasus tersebut, isu agama digunakan secara strategis untuk mereduksi elektabilitas kandidat tertentu, menciptakan ketegangan sosial, dan memecah belah masyarakat. Polarisasi ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga mengganggu proses demokrasi yang sehat dengan mendorong konflik berbasis identitas (Romli, 2019).

Elit agama memiliki peran strategis dalam memperkuat politik identitas di Indonesia. Sebagai figur dengan otoritas moral yang tinggi, mereka kerap kali menjadi penggerak utama dalam memobilisasi dukungan massa melalui simbol-simbol agama. Di tingkat lokal maupun nasional, peran elit agama ini tidak hanya memperkuat legitimasi politik, tetapi juga berpotensi memperparah disintegrasi sosial-politik.(Azizah, 2023). Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam politik identitas perlu dilihat secara kritis untuk mencegah dampak negatif terhadap keutuhan masyarakat.

Fenomena politik identitas dapat dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan teori habitus dari Pierre Bourdieu dan dramaturgi Erving Goffman. Teori habitus menjelaskan bagaimana pola kebiasaan, pengalaman, dan praktik sosial seseorang membentuk tindakan politiknya, termasuk dalam membangun politik identitas berbasis agama (Mustikasari et al., 2023). Di sisi lain, dramaturgi Goffman membantu memahami bagaimana aktor politik memanfaatkan simbol agama sebagai "panggung" untuk membentuk citra diri yang diinginkan dan mendapatkan dukungan public (Wibowo & Soraya, 2023). Pendekatan ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk mengurai motif dan strategi di balik fenomena politik identitas.

Penggunaan simbol agama dalam politik identitas di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap dinamika demokrasi. Meski mampu memobilisasi massa dan menciptakan loyalitas politik, fenomena ini juga menimbulkan tantangan serius, seperti polarisasi masyarakat dan konflik berbasis identitas. Pendekatan teori habitus Bourdieu dan dramaturgi Goffman memberikan wawasan yang berharga untuk memahami bagaimana simbol agama digunakan dalam politik identitas dan dampaknya terhadap demokrasi. Untuk itu, penelitian lebih lanjut diperlukan guna mengidentifikasi solusi dan langkah strategis yang dapat mendukung keberlanjutan demokrasi yang inklusif di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) untuk menganalisis fenomena politik identitas dalam demokrasi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan mendalam, memungkinkan peneliti memahami interaksi simbol agama dalam panggung politik melalui perspektif teori habitus Pierre Bourdieu dan teori dramaturgi Erving Goffman. Penelitian ini berfokus pada interpretasi terhadap sumber-sumber sekunder guna menyoroti makna dan praktik penggunaan simbol agama oleh aktor politik. Data yang digunakan bersumber dari berbagai literatur sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku teori sosiologi politik, dan laporan media massa yang relevan. Data ini dikumpulkan melalui proses seleksi literatur yang spesifik terhadap tema politik identitas, simbol agama, dan praktik aktor politik dalam panggung demokrasi Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan memadukan teori habitus dan dramaturgi sebagai kerangka kerja utama. Teori habitus digunakan untuk memahami konstruksi nilai budaya dalam simbol agama yang muncul dari interaksi sosial aktor politik. Sementara itu, teori dramaturgi diaplikasikan untuk menganalisis bagaimana aktor politik memanfaatkan simbol agama dalam panggung depan (front stage) untuk membangun citra tertentu di hadapan khalayak, serta bagaimana praktik ini mungkin berbeda dengan tindakan mereka di belakang panggung (back stage). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan fokus pada pola penggunaan simbol agama dan dampaknya terhadap konstruksi politik identitas dalam demokrasi Indonesia. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami peran simbol agama dalam strategi politik identitas, serta membuka ruang untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial dan praktik komunikasi politik memengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Simbol Agama dalam Politik Identitas**

Strategi Politik Simbolik di Indonesia Simbol agama menjadi alat strategis yang sering digunakan politisi Indonesia dalam kampanye politik. Strategi ini

melibatkan retorika keagamaan, pemakaian atribut religius seperti baju khas agama tertentu, hingga penggunaan tempat ibadah untuk memperkuat citra religius. Contohnya, dalam Pemilu Presiden 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, simbol agama digunakan secara masif untuk memperkuat narasi keagamaan dan mendapatkan legitimasi politik.

Retorika Keagamaan dan Polarisasi Retorika berbasis agama sering kali digunakan untuk menciptakan narasi yang dapat memobilisasi massa. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, isu SARA menjadi alat efektif untuk memengaruhi preferensi pemilih (Triantoro, 2019). Pada Pemilu Presiden 2019, pasangan calon menggunakan identitas keislaman untuk memperkuat daya tarik mereka kepada pemilih Muslim, yang diiringi dengan kampanye berbasis simbol dan jargon keagamaan.(Ronaldo & Darmaiza, 2021). Fenomena ini memperkuat politik identitas berbasis agama dan berujung pada polarisasi sosial yang mendalam.

Pemanfaatan Pakaian Religius dan Tempat Ibadah Penggunaan pakaian religius, seperti baju koko dan kerudung, serta tempat ibadah sebagai lokasi kampanye juga menjadi bagian penting dari strategi politik identitas. Misalnya, dalam kampanye Pilpres 2019 di Palembang, simbol-simbol agama digunakan untuk membingkai dukungan terhadap kandidat tertentu sebagai bentuk "jihad politik." Praktik ini menggabungkan elemen keagamaan dengan populisme untuk membangun legitimasi berbasis agama di mata pendukung (Rif'an, 2020).

Dampak terhadap Demokrasi penggunaan simbol agama dalam politik identitas membawa dampak besar pada demokrasi Indonesia (Zaluchu et al., 2019). Demokrasi yang idealnya menjadi wadah kompetisi gagasan sering kali dirusak oleh narasi yang menggunakan agama sebagai alat pembenaran kepentingan politik. Polarisasi akibat populisme agama tidak hanya memperburuk hubungan antarkelompok, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip multikulturalisme dan pluralisme yang menjadi dasar keberagaman Indonesia (Susanto, 2019).

Pemerintah dan penyelenggara pemilu memegang peran penting dalam menjaga demokrasi dari dominasi politik identitas berbasis agama. Transparansi dan netralitas dalam pengawasan pemilu, serta peningkatan literasi politik masyarakat, menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif politik

identitas (Azizah, 2023). Selain itu, kerja sama lintas kelompok agama diperlukan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan inklusif yang mengedepankan keberagaman. (Syafhendry & Utomo, 2019). Penggunaan simbol agama dalam politik identitas memberikan keuntungan elektoral yang signifikan bagi aktor politik, namun sering kali dengan risiko tinggi terhadap kohesi sosial dan stabilitas demokrasi. Dalam jangka panjang, diperlukan regulasi dan edukasi politik untuk memastikan politik Indonesia tetap mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan demokrasi.

### **Habitus dan Penggunaan Simbol Agama dalam Politik Indonesia**

Konsep *habitus* yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu menjadi kerangka yang relevan untuk memahami fenomena penggunaan simbol agama dalam politik Indonesia. Habitus merujuk pada pola disposisi yang berkembang dari pengalaman sosial individu, yang secara tidak langsung membentuk cara mereka bertindak, berpikir, dan memahami dunia (Cockerham & Hinote, 2009). Habitus bukanlah sesuatu yang sepenuhnya deterministik, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial tempat seseorang berada, seperti keluarga, pendidikan, agama, dan komunitas (Stuij, 2015). Dalam konteks politik, habitus menjelaskan bagaimana nilai-nilai dan norma yang terinternalisasi sejak dini menjadi landasan tindakan politisi dalam mengelola persepsi publik dan membangun legitimasi.

Habitus seorang politisi Indonesia sering kali dipengaruhi oleh budaya religius yang dominan dalam masyarakat. Pola asuh dalam keluarga religius, pendidikan berbasis agama, atau komunitas yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan membentuk disposisi para aktor politik untuk memahami bahwa agama memiliki daya tarik emosional yang kuat di masyarakat. Simbol-simbol agama seperti peci, sajadah, hingga retorika religius menjadi instrumen yang digunakan politisi untuk mengakses dan memobilisasi emosi kolektif, meskipun penggunaan tersebut terkadang jauh dari nilai religius yang substansial (Bourdieu et al., 1994). Misalnya, dalam praktik kampanye politik, seorang politisi yang berasal dari latar belakang religius menggunakan pengalaman sosial yang membentuk habitus mereka untuk merancang strategi politik. Mereka menciptakan narasi yang memanfaatkan simbol

agama agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat, bahkan ketika simbol tersebut hanya menjadi alat pragmatis tanpa makna spiritual yang mendalam. Penggunaan simbol agama dalam politik tersebut berfungsi sebagai berikut :

1. Sebagai Alat Mobilisasi Massa: Simbol agama sering digunakan untuk menciptakan kedekatan emosional dengan pemilih, yang memungkinkan politisi memobilisasi dukungan massa secara efektif. Pola ini terlihat dalam berbagai momentum politik seperti pemilihan umum, di mana isu-isu keagamaan sengaja diangkat untuk mengarahkan preferensi politik pemilih. Fenomena ini menciptakan budaya permisivitas di masyarakat terhadap politisasi agama, yang berdampak pada meningkatnya polarisasi sosial-politik (Zaluchu et al., 2019).
2. Populisme Religius : Pascakejatuhan Orde Baru, simbol agama semakin menonjol dalam wacana publik, terutama dalam gerakan populis yang berorientasi pada penguatan identitas keagamaan. Populisme religius sering kali berorientasi pada eksklusivitas dan anti-pluralisme, sehingga menghambat proses konsolidasi demokrasi. Dalam hal ini, habitus religius yang dominan di masyarakat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan politik melalui narasi identitas (Wijanarko, 2021).
3. Legitimasi Politik: Dalam lingkungan politik yang kompetitif, simbol agama digunakan untuk memperkuat legitimasi politik. Para elit sering memisahkan simbol tersebut dari nilai spiritualnya dan menjadikannya instrumen pragmatis untuk menarik simpati konstituen. Tindakan ini sering mengabaikan esensi religius simbol itu sendiri, menjadikannya semata alat manipulasi politik (Hasan, 2011).

Dalam kerangka Bourdieu, penggunaan simbol agama dalam politik dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi habitus terhadap medan (*field*) politik. Medan politik yang kompetitif mendorong para aktor untuk menyesuaikan strategi mereka dengan harapan dan norma yang berlaku di masyarakat (Cockerham & Hinote, 2009). Simbol agama menjadi *modal simbolik* yang memiliki nilai tinggi dalam masyarakat Indonesia yang religius. Namun, habitus ini juga menunjukkan kontradiksi. Meskipun politisi menggunakan simbol agama untuk memenuhi



harapan masyarakat, tindakan tersebut sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai religius yang sesungguhnya. Dengan kata lain, simbol agama direduksi menjadi sekadar alat pragmatis dalam strategi politik.

Penggunaan simbol agama dalam politik Indonesia mencerminkan hubungan erat antara habitus aktor politik dan ekspektasi sosial masyarakat. Meskipun memiliki makna mendalam, simbol agama sering kali disalahgunakan untuk tujuan pragmatis, menyebabkan polarisasi identitas, melemahkan demokrasi, dan memicu konflik sosial. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan kesadaran kolektif dan upaya pengelolaan yang bijak agar simbol agama dapat digunakan secara konstruktif tanpa mengorbankan esensi spiritualnya.

### **Dramaturgi Politik Identitas**

Teori dramaturgi Erving Goffman menawarkan perspektif unik untuk memahami bagaimana politik identitas, khususnya penggunaan simbol agama, dimainkan dalam ruang sosial. Dalam teori ini, kehidupan sosial diibaratkan sebagai panggung pertunjukan, di mana aktor (individu atau kelompok) berusaha mengelola kesan yang diterima audiens. Konsep utama teori ini adalah *front stage* (panggung depan) dan *back stage* (panggung belakang), yang mencerminkan dua sisi dari interaksi sosial (Scott, 2022). Dalam konteks politik Indonesia, teori ini relevan untuk menganalisis strategi pencitraan yang melibatkan simbol agama dan dampaknya pada demokrasi.

1. Politik Identitas di *Front Stage* atau Strategi Pencitraan Publik *Front stage* adalah ruang di mana politisi menampilkan identitas yang ingin diterima oleh masyarakat (Scott, 2022). Dalam konteks politik identitas, penggunaan simbol agama menjadi bagian dari strategi pencitraan publik untuk mengelola persepsi audiens. Simbol-simbol seperti peci, sajadah, atau retorika religius diintegrasikan ke dalam penampilan mereka sebagai representasi komitmen terhadap nilai-nilai agama. Untuk menunjang citra tersebut di panggung diperlukan alat sebagai berikut :
  - a) Manipulasi Simbolik: Politisi memahami kekuatan simbol agama untuk membangun koneksi emosional dengan masyarakat religius seperti



Indonesia. Simbol ini digunakan untuk memenuhi ekspektasi audiens terhadap politisi sebagai figur yang religius dan dapat dipercaya. Seperti dalam sebuah drama, simbol agama (peci, sajadah, atau penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an) menjadi bagian dari peralatan yang menciptakan kesan keagamaan (Sipa et al., 2021). Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2008 dan 2013, simbol agama terbukti menjadi strategi yang efektif. Para kandidat yang secara konsisten menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye mereka berhasil memperoleh dukungan signifikan, sehingga memenangkan pemilu dengan persentase suara yang besar (Agus, 2017). Aksi Bela Islam Gerakan populis seperti Aksi Bela Islam memanfaatkan isu agama untuk memobilisasi massa secara luas dan memengaruhi dinamika politik, termasuk hasil pemilihan gubernur Jakarta. Strategi ini menunjukkan bagaimana isu agama dapat digunakan untuk menciptakan solidaritas kelompok yang kuat dan memengaruhi preferensi pemilih (Susanto, 2019).

- b) Peran Media Sosial di era digital: Media sosial menjadi *front stage virtual*, tempat politisi menampilkan unggahan yang memperkuat citra religius. Misalnya, foto doa bersama atau video kunjungan ke pesantren adalah bentuk skrip visual yang disiapkan untuk memperkuat narasi religius politisi. Konten ini memungkinkan politisi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai agama tanpa harus berinteraksi langsung dengan audiens. Dalam media sosial, politisi mengelola kesan mereka secara terencana untuk memengaruhi persepsi publik secara emosional dan membangun kedekatan dengan nilai agama (Rustandi, 2020).

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu agama menjadi elemen sentral dalam kampanye. Kandidat tertentu menggunakan simbol agama untuk menarik simpati pemilih Muslim. Misalnya, Strategi Retorika Salah satu calon sering mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dalam pidatonya untuk menunjukkan kedekatan dengan ajaran Islam. Selain itu symbol

keagamaan seperti penampilan dengan peci, sarung, dan baju koko sering digunakan untuk memperkuat citra religius. Hasilnya, kampanye ini menciptakan persepsi bahwa kandidat tersebut adalah pilihan yang lebih sesuai secara keagamaan dibandingkan dengan kandidat lain yang dianggap kurang mewakili nilai-nilai Islam (Heryanto et al., 2018). Namun, penggunaan simbol ini juga memperdalam polarisasi sosial, karena kelompok masyarakat lain merasa teralienasi.

Selain contoh yang ada pada Pilkada DKI Jakarta, penggunaan media sosial sebagai *front stage* juga dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal maupun dunia, seperti Ganjar Pranowo memanfaatkan vlog di YouTube untuk membentuk citra religius, modern, dan dekat dengan masyarakat. Strategi ini dirancang untuk menarik perhatian pemilih muda, mengingat latar belakang partainya yang nasionalis. Pendekatan ini efektif dalam kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 untuk memperkuat kesan populis dan egaliter (Zulhazmi, 2020). Gabriela Firea Wali Kota Bucharest, Gabriela Firea, menggunakan platform Facebook untuk menyampaikan pesan-pesan bernuansa religius. Pesan ini berhasil menciptakan interaksi yang tinggi di media sosial, memperluas basis pengikutnya, dan memperkuat dukungan dari pemilih setia (Dogaru-Tulică, 2019). Paus Fransiskus Melalui akun Instagram resminya menunjukkan bagaimana organisasi keagamaan menggunakan media sosial untuk membangun daya tarik karismatik. Manajemen strategis yang dilakukan mencakup aspek jarak sosial, emosional, dan simbolis, yang memperkuat citra pemimpin institusi keagamaan ini (Golan & Martini, 2020).

Justin Trudeau Perdana Menteri Kanada, memanfaatkan Instagram untuk menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang ramah, tulus, dan dapat dipercaya. Unggahan yang mencakup kehidupan pribadinya dan nilai-nilai partainya menciptakan kesan positif yang kuat di mata public (Lalancette & Raynauld, 2019). Dalam konteks Filipina, kepercayaan pada otoritas religius mampu meredam dampak informasi kritis di media

sosial terhadap partisipasi dalam protes politik. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dapat berfungsi sebagai penyeimbang dalam dinamika politik berbasis media sosial (Buckley et al., 2021). Media sosial memungkinkan politisi untuk mengelola kesan mereka secara terencana dan memengaruhi persepsi publik secara emosional. Dengan menampilkan konten religius, politisi dapat membangun kedekatan dengan nilai agama dan menarik simpati pemilih. Strategi ini efektif dalam berbagai konteks, baik di Indonesia, Rumania, maupun Kanada, menunjukkan pentingnya pengelolaan citra dalam politik modern.

2. Politik Identitas di *Back Stage* atau realitas di balik simbol berbeda dengan front stage, back stage adalah ruang di mana politisi terbebas dari tekanan publik dan menunjukkan sisi autentik. Di sini, motivasi pragmatis sering kali lebih terlihat dibandingkan dengan komitmen spiritual (Sipa et al., 2021). Dalam banyak kasus, penggunaan simbol agama hanya menjadi alat politik tanpa merepresentasikan nilai spiritual yang sebenarnya seperti:

- a) *Pragmatism versus Authenticity*: Strategi politik identitas sering kali menunjukkan adanya jarak antara peran yang dimainkan di front stage dan keyakinan atau nilai yang dianut di back stage. Simbol agama digunakan untuk tujuan praktis seperti mendapatkan dukungan suara, terlepas dari sejauh mana politisi tersebut benar-benar menghayati nilai religius (Nashmi & Mehdi, 2022).
- b) Krisis Kepercayaan Publik : Ketidaksesuaian antara citra di *front stage* dan realitas di *back stage* menciptakan kesan manipulasi. Ketika masyarakat menyadari perbedaan antara citra publik yang ditampilkan dan realitas di balik layar, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap politisi. Strategi dramaturgis yang tidak autentik berpotensi menciptakan kesan manipulasi dan oportunisme (Nashmi & Mehdi, 2022).

Simbol agama sering dimanfaatkan oleh politisi untuk menarik simpati pemilih dan menggalang dukungan massa. Di Indonesia, simbol-simbol ini digunakan sebagai alat politik untuk memengaruhi pilihan pemilih, meskipun tidak

selalu mencerminkan tingkat religiusitas yang sebenarnya dari masyarakat (Zaluchu et al., 2019). Di Amerika Serikat, simbol agama telah lama menjadi elemen penting dalam kampanye presiden, sering kali digunakan untuk memanipulasi opini public (Donahue, 1975). Hal serupa juga terjadi di Kenya, di mana simbol agama menjadi bagian dari retorika politik untuk memengaruhi hasil pemilu (Wambua et al., 2023). Politisi yang menggunakan simbol agama dalam kampanye kerap menunjukkan ketidakkonsistenan antara citra religius yang ditampilkan dan kebijakan yang mereka usung. Di Indonesia, eksploitasi simbol agama dalam politik sering kali lebih berorientasi pada kepentingan elektoral daripada nilai-nilai agama itu sendiri (Zaluchu et al., 2019). Di Italia, politisi populis sayap kanan menggunakan simbol agama untuk menentang otoritas agama tradisional sekaligus mendorong agenda politik mereka yang bertentangan dengan nilai religius yang sebenarnya (Marchetti et al., 2022).

Ketidaksesuaian antara penggunaan simbol agama dalam kampanye dan kebijakan yang tidak selaras dengan nilai religius dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik. Di Indonesia, populisme religius yang mengandalkan simbol agama dalam narasi politik telah mengancam sistem demokrasi dengan memperburuk polarisasi sosial (Wijanarko, 2021). Sementara itu, di Kenya, eksploitasi simbol agama dalam retorika politik menimbulkan kontroversi yang memengaruhi keputusan pemilih secara emosional, bukan rasional (Wambua et al., 2023). Pemanfaatan simbol agama dalam politik sering kali tidak sejalan dengan nilai dan gaya hidup para politisi yang menggunakannya, menciptakan kesan manipulasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Italia, dan Kenya, di mana simbol agama dijadikan instrumen politik alih-alih representasi nilai religius. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi retorika politik berbasis agama demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi.

### **Dampak, Kontradiksi, dan Solusi Politik Identitas**

Politik identitas berbasis agama menjadi salah satu fenomena yang menonjol dalam lanskap demokrasi, terutama di negara dengan populasi religius yang besar seperti Indonesia. Meskipun strategi ini efektif dalam memenangkan dukungan politik, dampaknya sering kali menimbulkan kontradiksi yang kompleks. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak dan kontradiksi yang dihasilkan oleh politik identitas berbasis agama.:

#### 1. Dampak Positif: Memobilisasi Partisipasi Politik

Politik identitas berbasis agama memiliki kemampuan untuk memobilisasi masyarakat secara luas, terutama kelompok yang merasa terpinggirkan.

- a) Penguatan Solidaritas Kelompok: Strategi ini dapat memperkuat rasa solidaritas dalam komunitas berbasis agama, mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi (Zaluchu et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa perasaan diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas dapat meningkatkan solidaritas dalam kelompok tersebut, yang terlihat dari ekspresi identitas kolektif yang lebih kuat dan dukungan yang lebih besar terhadap partai politik dan kebijakan yang menguntungkan anggota kelompok mereka (Abdelhadi & O'Brien, 2020). Selain itu, kehadiran di tempat ibadah secara teratur juga dikaitkan dengan peningkatan partisipasi politik di kalangan minoritas etnis (Sobolewska et al., 2015).
- b) Representasi Aspirasi Agama: Dengan mengangkat isu-isu keagamaan, politik identitas sering kali menjadi saluran bagi kelompok tertentu untuk memperjuangkan nilai atau norma yang mereka yakini penting untuk diterapkan dalam kebijakan publik. Politik identitas sering kali menjadi saluran bagi kelompok tertentu untuk memperjuangkan nilai atau norma yang mereka yakini penting untuk diterapkan dalam kebijakan publik. Misalnya, perubahan dalam salience etnis dan agama di Afrika menunjukkan bahwa anggota kelompok yang dipengaruhi oleh konteks agama lebih cenderung memprioritaskan kebijakan perilaku dan moral (McCauley, 2014). Selain itu, gereja dan tempat ibadah memainkan peran penting dalam sosialisasi politik imigran, membantu mereka

memahami dan berpartisipasi dalam masyarakat politik Amerika (Huckle & Silva, 2020).

- c) Legitimasi Politik: Pemimpin yang menggunakan simbol-simbol agama sering kali mendapatkan legitimasi moral di mata pendukungnya, karena dianggap selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Pemimpin yang menggunakan simbol-simbol agama sering kali mendapatkan legitimasi moral di mata pendukungnya. Penelitian menunjukkan bahwa pesan agama yang memberikan citra diri positif dapat memotivasi partisipasi politik, seperti yang terlihat dalam kampanye pesan teks politik di Nairobi, Kenya (McClendon & Riedl, 2015). Selain itu, kehadiran anggota kelompok yang diuntungkan dalam protes dapat meningkatkan identifikasi politik di antara pengamat dari kelompok yang diuntungkan dan terpinggirkan, serta meningkatkan keyakinan bahwa solidaritas adalah perilaku normatif (Kutlaca et al., 2021).

## 2. Dampak Negatif: Fragmentasi Sosial

Di sisi lain, politik identitas berbasis agama sering kali menimbulkan efek polarisasi yang mendalam di masyarakat.

- a) Polarisasi Sosial: Strategi ini cenderung membagi masyarakat menjadi "kami" dan "mereka," berdasarkan identitas agama tertentu. Hal ini dapat memicu konflik horizontal di antara kelompok agama yang berbeda atau bahkan di dalam satu agama yang sama (Hamdi, 2017). Seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh jelas dari polarisasi sosial berbasis agama. Kampanye politik saat itu menggunakan isu agama untuk menyerang salah satu kandidat, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang beragama non-Muslim. Isu ini memicu pembagian masyarakat menjadi dua kubu yang tajam: pendukung Ahok dan mereka yang menolaknya karena alasan agama. Polarisasi ini menghasilkan ketegangan sosial yang berlangsung lama bahkan setelah pilkada selesai, dengan meningkatnya diskriminasi dan segregasi sosial di antara kelompok-kelompok agama (Ubaid & Subandi, 2017).

- b) Diskriminasi dan Eksklusi: Kelompok minoritas sering kali menjadi korban diskriminasi, baik secara langsung melalui kebijakan yang eksklusif maupun secara tidak langsung melalui narasi yang membingkai mereka sebagai "lain" atau "tidak sepenuhnya diterima" (Purba & Widodo, 2021). Seperti kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah sering menjadi target diskriminasi dan kekerasan. Dalam beberapa kasus, isu politik identitas berbasis agama digunakan untuk meminggirkan kelompok ini secara politik dan sosial. Contohnya adalah pembatasan kegiatan ibadah mereka di beberapa daerah. Diskriminasi ini memperkuat narasi eksklusif yang mengalienasi kelompok minoritas dari kehidupan sosial dan politik utama, menciptakan ketidakadilan struktural di masyarakat (Barsihannor et al., 2023).
- c) Kerusakan Jangka Panjang pada Kohesi Sosial: Polarisasi ini sering kali memicu konflik horizontal dan vertikal. Ketika simbol agama digunakan sebagai alat legitimasi, ia dapat memprovokasi ketegangan antarindividu maupun kelompok berisiko menghancurkan modal sosial berupa kepercayaan dan toleransi, yang merupakan fondasi penting dalam masyarakat majemuk (Pradana et al., 2022). Seperti penggunaan simbol agama dalam pemilu NTB 2008 dan 2013 berhasil memenangkan suara mayoritas, tetapi di sisi lain memperkuat segregasi berbasis identitas agama. Kompetisi politik berbasis agama menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat di tingkat lokal. Dampak: Hubungan antar kelompok agama yang sebelumnya harmonis menjadi terganggu, dan ketegangan ini masih memengaruhi hubungan sosial hingga saat ini (Agus, 2017).

### 3. Dampak pada Demokrasi

Strategi politik identitas berbasis agama memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas demokrasi (Wijanarko, 2021).



- a) Instrumentalisasi Agama: Ketika agama digunakan sebagai alat politik, nilai-nilai spiritual yang seharusnya bersifat universal sering kali dipolitisasi untuk tujuan pragmatis. Hal ini dapat merusak esensi agama itu sendiri (Kalyvas, 1998).
- b) Demokrasi Substantif yang Terpinggirkan: Fokus pada identitas agama sering kali mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Akibatnya, perdebatan publik menjadi dangkal dan kurang produktif (Bloom & Arikan, 2013).
- c) Erosi Pluralisme: Demokrasi yang sehat membutuhkan pengakuan terhadap keragaman. Namun, politik identitas berbasis agama cenderung menggerus nilai pluralisme dan mendorong homogenitas dalam politik (Bader, 2003).

#### 4. Kontradiksi dalam Politik Identitas Berbasis Agama

Meski politik identitas berbasis agama menawarkan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, ia juga membawa berbagai kontradiksi yang mempersulit implementasi nilai-nilai demokratis (Ronaldo & Darmaiza, 2021):

- a) Agama sebagai Penyatu dan Pemecah: Di satu sisi, agama dapat menyatukan kelompok dengan identitas yang sama. Namun, di sisi lain, ia menjadi pemecah jika digunakan untuk membangun hierarki berdasarkan kepercayaan tertentu.
- b) Citra Religius vs. Kepentingan Pragmatis: Politisi yang menggunakan agama sebagai identitas sering kali memanipulasi simbol-simbol religius untuk kepentingan elektoral, sehingga keotentikan nilai religius mereka dipertanyakan.
- c) Meningkatkan Partisipasi, Mengorbankan Keadilan Sosial: Politik identitas berbasis agama memang dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok mayoritas, tetapi sering kali mengabaikan hak dan kebutuhan kelompok minoritas, yang menciptakan ketimpangan sosial lebih lanjut.

#### 5. Dampak Jangka Panjang dan Solusi

Dalam jangka panjang, politik identitas berbasis agama dapat merusak integrasi nasional dan memperlemah tatanan demokrasi inklusif. Untuk mengurangi dampak buruknya, diperlukan langkah strategis, seperti:

- a) Pendidikan Multikultural: Pendidikan yang menekankan pentingnya keragaman dan toleransi dapat membantu membangun pemahaman bersama dan mengurangi sikap sektarian. Studi menunjukkan bahwa pendidikan yang terintegrasi secara agama memiliki manfaat jangka panjang dalam mempromosikan sikap yang kurang sektarian terhadap identitas nasional dan preferensi konstitusional. Pendidikan multikultural yang menggabungkan berbagai kelompok agama dapat menciptakan landasan bersama yang baru dalam politik, seperti yang terlihat dalam konteks Irlandia Utara (Hayes et al., 2007).
- b) Regulasi Pemanfaatan Simbol Agama dalam Politik: Integrasi agama dalam kebijakan negara dalam masyarakat multikultural sering kali menimbulkan tantangan yang rumit dan kontroversial. Pemerintah harus menyeimbangkan antara menghormati kebebasan beragama dan menjaga pemisahan antara agama dan negara. Regulasi yang membatasi penggunaan agama untuk kepentingan politik pragmatis dapat membantu menjaga esensi agama sebagai nilai moral yang universal dan mencegah ketegangan sosial yang disebabkan oleh eksploitasi agama dalam politik (Annisa & Tabassum, 2023).
- c) Dialog Antar-Komunitas: Membangun ruang dialog yang inklusif sangat penting untuk mengatasi ketegangan yang muncul akibat politik identitas. Dialog antar-komunitas dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang berbeda dan mempromosikan kohesi sosial<sup>2</sup>. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog ini, dengan guru yang memahami perbedaan agama dan budaya dapat membantu siswa mengembangkan sikap yang lebih inklusif dan toleran (White, 2009).

Politik identitas berbasis agama adalah pisau bermata dua dalam demokrasi. Di satu sisi, ia mampu memperkuat partisipasi politik dan solidaritas kelompok,

namun di sisi lain, dapat menciptakan fragmentasi sosial, diskriminasi, dan merusak kohesi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan strategis diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya, seperti melalui pendidikan multikultural, regulasi pemanfaatan simbol agama dalam politik, dan penguatan dialog antar-komunitas. Dengan demikian, politik berbasis identitas dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, menjaga harmoni sosial serta integrasi nasional di tengah keberagaman.

## **SIMPULAN**

Politik identitas berbasis agama telah terbukti menjadi fenomena yang kompleks dan berpengaruh dalam konteks demokrasi di Indonesia. Meskipun strategi ini dapat memperkuat partisipasi politik dan solidaritas di kalangan kelompok tertentu, dampak negatifnya tidak dapat diabaikan. Penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye politik sering kali berujung pada polarisasi sosial yang mendalam, yang membagi masyarakat menjadi kelompok "kami" dan "mereka." Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan konflik antarkelompok, yang pada akhirnya dapat merusak kohesi sosial dan integritas nasional.

Penting untuk menyadari bahwa politik identitas tidak hanya sekadar alat untuk mobilisasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma yang terinternalisasi di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan strategis diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari fenomena ini. Rekomendasi yang diusulkan mencakup penguatan pendidikan multikultural yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberagaman dan toleransi. Selain itu, regulasi yang ketat terhadap pemanfaatan simbol agama dalam politik perlu diterapkan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dan manipulasi.

Penguatan dialog antar-komunitas juga sangat diperlukan untuk membangun saling pengertian dan toleransi di antara berbagai kelompok. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan politik berbasis identitas dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini

akan membantu menjaga harmoni sosial dan integrasi nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu merayakan keberagaman tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhadi, E., & O'Brien, J. (2020). Perceived Group Deprivation and Intergroup Solidarity: Muslims' Attitudes towards Other Minorities in the United States. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel11110604>
- Agus, A. (2017). *MENAKARKEKUATAN SIMBOL AGAMA DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL*. 14. <https://doi.org/10.20414/TASAMUH.V14I2.151>
- Annisa, N. N., & Tabassum, N. (2023). Challenges of Multiculturalism: Integration of Religion in State Policy. *Religion and Policy Journal*. <https://doi.org/10.15575/rpj.v1i1.433>
- Azizah, N. (2023). Personification of Religious Elite, Political Behavior and Identity Politics: A Profile of Regional Elections in Indonesia. *International Journal of Arts and Humanities Studies*. <https://doi.org/10.32996/ijahs.2023.3.1.4>
- Bader, V. (2003). Religious Diversity And Democratic Institutional Pluralism. *Political Theory*, 31, 265–294. <https://doi.org/10.1177/0090591702251012>
- Barsihannor, B., Tahir, G., & Hasan, H. B. (2023). Minority Group in Urban Society Conflict and Threats To Religious Freedom a Case Study of Symbolic Violence Against Ahmadiyya in Urban Society. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 28(2), 189. <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i2.7465>
- Bloom, P. B.-N., & Arikan, G. (2013). Priming Religious Belief and Religious Social Behavior Affects Support for Democracy. *International Journal of Public Opinion Research*, 25, 368–382. <https://doi.org/10.1093/IJPOR/EDS030>
- Bourdieu, P., Holmes, O. W., & Wacquant, L. J. D. (1994). An Invitation to Reflexive Sociology. *The American Historical Review*, 99(5), 1644. <https://doi.org/10.2307/2168398>
- Buckley, D., Gainous, J., & Wagner, K. (2021). Is religion the opiate of the digital masses? Religious authority, social media, and protest. *Information, Communication & Society*, 26, 682–698. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1971279>
- Cockerham, W. C., & Hinote, B. P. (2009). Quantifying habitus: Future directions. *Quantifying Theory: Pierre Bourdieu*, 201–210. [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9450-7\\_16](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9450-7_16)
- Dogaru-Tulică, A.-L. (2019). How Do Women Politicians Display Their Online Faith in Social Media? Case study: The Mayor of Bucharest, Gabriela Firea. *Journal of Media Research*. <https://doi.org/10.24193/jmr.33.6>
- Donahue, B. (1975). The Political Use of Religions Symbols: A Case Study of the 1972 Presidential Campaign. *The Review of Politics*, 37, 48–65.

- <https://doi.org/10.1017/S0034670500025717>
- Golan, O., & Martini, M. (2020). The Making of contemporary papacy: manufactured charisma and Instagram. *Information, Communication & Society*, 23, 1368–1385. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1567803>
- Hamdi, S. (2017). Conflicting Religious Identities: Blaspheming Islam and the Future of Democracy in Indonesia. *Al-Albab*, 6, 247–262. <https://doi.org/10.24260/ALALBAB.V6I2.778>
- Hasan, N. (2011). Islam in Provincial Indonesia: Middle Class, Lifestyle, and Democracy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 49, 119–157. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2011.491.119-157>
- Hayes, B., McAllister, I., & Dowds, L. (2007). Integrated Education, Intergroup Relations, and Political Identities in Northern Ireland. *Social Problems*, 54, 454–482. <https://doi.org/10.1525/SP.2007.54.4.454>
- Heryanto, G. G., Fahrudin, D., & Rusfian, E. (2018). *The Symbolic Construction of Religious Issues in the 2017 Campaign and Propaganda in Jakarta Election*. <https://doi.org/10.5220/0009929414511457>
- Huckle, K., & Silva, A. (2020). People of Color, People of Faith: The Effect of Social Capital and Religion on the Political Participation of Marginalized Communities. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel11050249>
- Kalyvas, S. (1998). Democracy and Religious Politics. *Comparative Political Studies*, 31, 292–320. <https://doi.org/10.1177/0010414098031003002>
- Khoirunnisa, K. (2023). Pemilu Dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan Dan Keagamaan. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 9(1), 36–54. <https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6999>
- Kutlaca, M., Radke, H., & Becker, J. (2021). The Impact of Including Advantaged Groups in Collective Action Against Social Inequality on Politicized Identification of Observers From Disadvantaged and Advantaged Groups. *Political Psychology*. <https://doi.org/10.1111/POPS.12755>
- Lalancette, M., & Raynauld, V. (2019). The Power of Political Image: Justin Trudeau, Instagram, and Celebrity Politics. *American Behavioral Scientist*, 63, 888–924. <https://doi.org/10.1177/0002764217744838>
- Marchetti, R., Righetti, N., Pagiotti, S., & Stanziano, A. (2022). Right-Wing Populism and Political Instrumentalization of Religion. *Journal of Religion in Europe*. <https://doi.org/10.1163/18748929-bja10052>
- McCauley, J. (2014). The Political Mobilization of Ethnic and Religious Identities in Africa. *American Political Science Review*, 108, 801–816. <https://doi.org/10.1017/S0003055414000410>
- McClendon, G., & Riedl, R. (2015). Religion as a Stimulant of Political Participation: Experimental Evidence from Nairobi, Kenya. *The Journal of Politics*, 77, 1045–1057. <https://doi.org/10.1086/682717>
- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9–14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Nashmi, B. H., & Mehdi, W. S. (2022). A Pragmatic Study of Identity Representation in American Political Speeches. *Journal of the College of*

- Education for Women*, 33(1), 16–32.  
<https://doi.org/10.36231/coedw.v33i1.1560>
- Pradana, M. Y. A., Parasmana, M., Fajrin, H., & Fadilah, M. F. (2022). Politisasi Agama dalam Ranah Konflik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kritis). *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA*.  
<https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v7i1.30716>
- Purba, J. L. P., & Widodo, P. (2021). Kajian Etis Penggunaan Isu Agama dalam Politik Polarisasi. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 2(2), 75–90.  
<https://doi.org/10.55884/thron.v2i2.23>
- Rif'an, F. A. (2020). Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*.  
<https://doi.org/10.21580/JPW.V2I2.8499>
- Romli, L. (2019). Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.  
<https://doi.org/10.15294/IPSR.V4I1.17214>
- Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*.  
<https://doi.org/10.36256/IJRS.V3I1.150>
- Rustandi, L. R. (2020). Disrupsi Nilai Keagamaan dalam Dakwah Virtual di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Agama di Era Digital. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i1.1036>
- Scott, S. (2022). Dramaturgical Traditions. *The Oxford Handbook of Symbolic Interaction*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190082161.013.6>
- Sipa, A. M. D., Wadi, H., & Fahrurrazi, F. (2021). Religion and Politics: Symbolization of Religion in the contestation of legislative elections 2019. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*.  
<https://doi.org/10.30984/kijms.v2i2.63>
- Sobolewska, M., Fisher, S., Heath, A., & Sanders, D. (2015). Understanding the effects of religious attendance on political participation among ethnic minorities of different religions. *European Journal of Political Research*, 54, 271–287. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12081>
- Stuij, M. (2015). Habitus and social class: a case study on socialisation into sports and exercise. *Sport, Education and Society*, 20(6), 780–798.  
<https://doi.org/10.1080/13573322.2013.827568>
- Susanto, N. (2019). Politicization of Religion and the Future of Democracy in Indonesia in Populism Theory. *Journal for The Study of Religions and Ideologies*, 18, 139–158.
- Syafhendry, & Utomo, S. (2019). 2019 Election and Strengthening Political Identity: The Importance of the Role of Nu & Muhammadiyah in Maintaining Quality Democracy. *Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity*.  
<https://doi.org/10.5220/0009427104720476>
- Triantoro, D. A. (2019). Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*. <https://doi.org/10.24002/jik.v16i1.1495>
- Ubaid, A. H., & Subandi, H. (2017). *Political Polarization based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial*. 8, 411–



441. <https://doi.org/10.18196/JGP.2017.0054.411-441>
- Wambua, B. M., Maurice, P. M., Wachira, A. N., Menecha, J. B., & Kabaji, E. (2023). The Exploitation of Religious Symbols in Political Rhetoric in Kenya: A Critical Perspective. *The International Journal of Humanities & Social Studies*. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2023/v11/i7/hs2307-034>
- White, K. (2009). Connecting religion and teacher identity: The unexplored relationship between teachers and religion in public schools. *Teaching and Teacher Education*, 25, 857–866. <https://doi.org/10.1016/J.TATE.2009.01.004>
- Wibowo, G., & Soraya, I. (2023). Dramaturgi Dalam Membentuk Persentasi Diri Presenter. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 59–72. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.14650>
- Wijanarko, R. (2021). *Religious Populism and Public Sphere in Indonesia*. 1–9. <https://doi.org/10.12962/J24433527.V0I0.8547>
- Yunus, F. M., Yasin, T. H., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(September), 121–137.
- Zaluchu, S. E., Karnadhi, S., Widjaja, F., & Siahaan, H. (2019). Legitimation of Religious Symbols in Politics: Descriptive Analysis of The Narration of Indonesian Election Campaign 2019. *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.13>
- Zulhazmi, A. Z. (2020). Displaying Religious Image on Youtube: Ganjar Pranowo's Political Communication Strategy on Social Media. *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.22515/DINIKA.V5I1.2601>